

Strategi Perpustakaan dalam Meningkatkan Minat Baca Pemustaka di Perpustakaan Kabupaten Bintan

Ayu Pebrianti¹, Velia Yolanda², Alfariq Ramadani³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Indonesia

Email: ayupebriantiayu@gmail.com

ABSTRAK

Rendahnya minat baca di suatu negara berdampak besar bagi generasi penerus bangsa. Kepulauan Riau termasuk dalam tiga besar provinsi dengan aktivitas literasi sedang namun, tingkat aktivitas literasinya masih belum berada pada tahap yang lebih baik. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Perpustakaan Daerah Kabupaten Bintan dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, pengumpulan data melalui observasi langsung atau wawancara. Strategi yang dilakukan oleh Perpustakaan Daerah Kabupaten Bintan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan kunjungan masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan prima, menggalakkan kegiatan dengan memanfaatkan media sosial, dan membangun kerjasama dengan instansi vertikal. Meski masih memiliki kendala yang nyata namun, perpustakaan berhasil meningkatkan antusiasme pengunjung secara signifikan.

Kata Kunci : Strategi, Perpustakaan, Minat baca, Pemustaka

PENDAHULUAN

Membaca adalah kegiatan untuk memahami teks yang tertulis dalam buku atau media bacaan. Menurut Tarigan membaca merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi berupa pesan yang disampaikan oleh penulis melalui kata-kata dalam tulisan atau untuk memahami arti yang ada dalam tulisan (Harianto, 2020). Maknanya, kegiatan membaca menjadi media menggali informasi, memahami sebuah permasalahan, menganalisa data, dan memperdalam wawasan terhadap bidang ilmu yang dibaca. Kegiatan membaca ini memiliki manfaat bagi setiap masyarakat terutama untuk siswa dan mahasiswa dalam memahami pelajaran.

Terdapat beberapa manfaat dari melakukan kegiatan membaca diantaranya meningkatkan skil dalam berpikir, menambah pengetahuan, melatih otak, melatih daya ingat, membangun konsentrasi,

dan dapat mengurangi stress atau depresi (Susanti et al., 2020; Wisuda Lubis, 2020). Membaca buku dapat diibaratkan sebagai mengetahui suatu dunia hanya dengan memahami teks sehingga menjadi hal yang lumrah ketika terbentuknya pernyataan membaca adalah jendela dunia. Pernyataan tersebut juga dapat diilustrasikan sebagai seseorang yang tidak pernah mengetahui Negara Inggris dan tidak pernah pergi ke sana, mampu mengerti tentang Inggris hanya membaca buku-buku yang berhubungan dengan Negara Inggris. Hal ini membuktikan kegiatan membaca buku memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

Sejalan dengan tujuan dan cita-cita negara yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Dalam hal ini, untuk dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan dari Negara Indonesia hal yang dapat dilakukan masyarakat melalui membaca dan pendidikan untuk menjadikan masyarakat yang memiliki pengetahuan luas dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Instansi pemerintah yang memiliki hubungan terhadap salah satu tujuan dan cita-cita negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah Instansi Pendidikan dan Perpustakaan. Perpustakaan merupakan instansi pemerintah yang menyediakan koleksi berbagai macam buku, karya tulis ilmiah, dan lain-lain. Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, 2007) pada bab 1 pasal 1 tentang perpustakaan memiliki fungsi sebagai “penyedia pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa”. Namun, adanya perpustakaan ini tidak meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Dilansir dari (Novrizaldi, 2021) hasil survei yang dirilis oleh Organization For Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2019, menunjukkan Indonesia berada di tingkatan 62 dari 70 negara atau sepuluh negara terakhir yang tingkat literasinya masih rendah. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi literasi di Indonesia diantaranya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kelancaran saat membaca, sulit untuk memahami isi atau makna dalam buku, tidak terbiasa membaca, tidak memiliki waktu yang luang, membaca bukan dari inisiatif sendiri, penglihatan, dan pendengaran yang kurang baik (Kasrawati et al., 2022; Sari,

2018). Faktor eksternal, seperti buku-buku yang tersedia di perpustakaan atau sekolah merupakan terbitan lama, buku yang tersedia kurang lengkap, dan tidak ada inisiatif keluarga untuk mengajak anak-anak ke perpustakaan atau toko buku (Sari, 2018).

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti strategi dari salah satu institusi pemerintahan seperti perpustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Penelitian akan dilakukan di Kepulauan Riau tepatnya di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bintan. Walaupun Kepulauan Riau termasuk provinsi nomor 3 teratas dengan aktivitas literasi sedang, tetapi tingkat aktivitas literasinya masih belum kepada tahap yang lebih baik sehingga peneliti tertarik untuk mencari tahu strategi apa yang akan dilakukan oleh Perpustakaan Daerah Kabupaten Bintan dalam meningkatkan minat baca masyarakat.

STUDI KEPUSTAKAAN

Menurut (Rhoni, 2018) strategi merupakan cara pandang dalam melaksanakan suatu gagasan yang sudah direncanakan dan akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Menurut (Harahap, 2021) perpustakaan adalah tempat yang dipelihara dan memiliki berbagai bahan bacaan untuk pengunjung di mana pengunjung dapat meminjam koleksi dari bahan bacaan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Strategi perpustakaan adalah sebuah perencanaan agar perpustakaan sebagai tempat penyediaan bahan bacaan dapat terus berkembang dan terpelihara dengan baik. Adapun, menurut PP nomor 24 Tahun 2014 mengenai Standar Nasional Perpustakaan menyebutkan bahwa standarisasi perpustakaan digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan

pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut (Progo, 2022) strategi yang dapat digunakan dalam meningkatkan minat baca, yaitu (1) Melakukan sosialisasi kepada setiap individu untuk mengunjungi perpustakaan. (2) Melakukan promosi via media sosial dengan mengunggah kegiatan, foto, video terkait buku, dan fasilitas perpustakaan hingga mengadakan literasi bersama secara daring. (3) Menyediakan layanan perpustakaan keliling. (4) Membentuk Duta Literasi di setiap sekolah untuk mengembangkan dan meningkatkan minat baca setiap siswa-siswi. (5) Menyediakan layanan electronic book (e-book) agar setiap individu dapat membaca buku di mana saja melalui media digital.

Menurut Amelia (dalam Alpian & Ruwaida, 2022) minat adalah ketika adanya ketertarikan terhadap sesuatu di mana minat diekspresikan sebagai ketertarikan lebih antara suatu hal dengan hal lainnya. Dengan adanya minat aktivitas yang dilakukan akan menyenangkan sehingga seseorang dapat melakukan aktivitas yang menjadi minatnya secara berulang. Adapun, membaca merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memperhatikan isi kalimat dalam suatu tulisan untuk mengetahui informasi dan makna penting didalam teks bacaan. Dengan demikian, Siregar (dalam Elendiana, 2020) menyebutkan minat baca adalah suatu ketertarikan yang tinggi untuk membaca.

Menurut Hardjoprakosa (dalam Elendiana, 2020) menyatakan ada beberapa hal yang menjadi penyebab seseorang memiliki minat baca yang rendah, yaitu (1) Kurangnya dukungan dari pemerintah yang disalurkan melalui lembaga pendidikan maupun swasta untuk meningkatkan motivasi peserta didik untuk meningkatkan minat baca. (2) Kurangnya perhatian orang tua dalam

meningkatkan minat baca anaknya. (3) Harga buku terlalu tinggi untuk beberapa kalangan masyarakat. (4) Minimnya jumlah pengarang karena upah yang didapatkan tidak menentu. (5) Minimnya jumlah perpustakaan di tiap provinsi. (6) Perpustakaan yang tersedia belum terkelola dengan baik. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah, keluarga, masyarakat maupun lembaga pendidikan berperan sangat penting dalam upaya meningkatkan minat baca.

Menurut (Nazhifah, 2022) pustakawan adalah sumber daya manusia yang menjalankan tugas dan fungsi perpustakaan. Dalam melaksanakan tugasnya pustakawan harus berperan secara proaktif demi meningkatkan minat baca masyarakat sejak dini. Oleh karenanya, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat salah satunya dengan menyusun strategi dengan memperhatikan kelompok pustakawan yang sering berkunjung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan Kualitatif Deskriptif, yaitu mengumpulkan data melalui observasi langsung atau wawancara dengan instansi yang menjadi subjek penelitian kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif atau penggambaran fenomena secara terperinci (Rusandi & Rusli, 2021). Dalam hal ini, peneliti mengunjungi lokasi objek penelitian untuk mendapatkan informasi seputar strategi dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Dilakukan dengan teknik wawancara langsung oleh pihak berwenang serta diperkuat dengan observasi dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan dengan kata-kata menjadi landasan yang mendeskripsikan pemaparan mengenai “strategi perpustakaan dalam

meningkatkan minat baca pemustaka di perpustakaan Kabupaten Bintan”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Desa Teluk Bakau tentunya perlu adanya dukungan dan perhatian dari pemerintah setempat. Peningkatan kesejahteraan nelayan yang ada dapat dilakukan berupa meluncurkan program-program kebijakan dari pemerintah terhadap masyarakat. Seperti yang telah dilakukan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri dalam Renstra DKP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan mengenai implementasi kebijakan perikanan tangkap dalam mendukung kesejahteraan nelayan di Desa Teluk Bakau. Dimana dalam mendapatkan hasil ini peneliti menggunakan indikator teori dari George Edward III yang peneliti kutip dalam jurnal Yuliah, 2020 untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh DKP terhadap masyarakat nelayan yang ada di Desa Teluk Bakau, dimana hasil penelitian ini yang mengacu pada indikator teori Edward III yaitu;

Komunikasi (Communication)

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti komunikasi antara pemerintah setempat atau Dinas kelautan dan Perikanan sudah berjalan sangat baik. Dimana berdasarkan pengamatan peneliti dan informasi dari salah satu masyarakat Desa Teluk Bakau bahwa, pemerintah setempat telah membuat program sosialisasi kepada masyarakat, seperti yang saat ini masih berjalan mengenai sosialisasi pembinaan tentang pengolahan dan pemasaran ikan, yang sudah dijalankan masyarakat Desa

Teluk Bakau seperti mengolah menjadi otak-otak, kerupuk ikan, pempek dan sebagainya. Selain itu juga terdapat sosialisasi tempat pelelangan ikan yang dimana pada saat ini masih dibicarakan oleh DKP kepada masyarakat Desa Teluk Bakau. Hal ini yang menjadi contoh adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan dan melaksanakan program kebijakan yang telah dibuat berdasarkan Renstra Dinas kelautan dan Perikanan.

Sumberdaya (resources)

Berdasarkan data dari Renstra DKP Kepri bahwa pada tahun 2021 jumlah sumber daya atau staf pegawai Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kepri sebanyak 308 orang. Dimana dengan jumlah staf pegawai tersebut juga telah memiliki bagian-bagian dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya sesuai dengan bagian kerja masing-masing staf. Dalam hal ini diharapkan staf pegawai DKP dapat menjalankan tugasnya dengan baik demi membangun kelautan dan perikanan serta meningkatkan perekonomian daerah dibidang kelautan.

Berdasarkan Renstra DKP Kepri 2021-2026 Dinas kelautan dan Perikanan telah membuat beberapa program kebijakan yang dimana hal ini sebagai tujuan atau sasaran program pemerintah kepada masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan pengembangan perikanan dan kelautan di provinsi Kepri terutama di Desa Teluk Bakau, Kabupaten Bintan. Program kebijakan yang telah dijalankan oleh DKP terhadap masyarakat yang ada di Desa teluk Bakau seperti: Pelatihan keterampilan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan, peningkatan nilai dan promosi

hasil perikanan dan kelautan; pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan; jaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkapan; pengembangan sistem jaminan dan pengujian mutu hasil perikanan. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa komponen sumberdaya manusia yang dilakukan oleh staf DKP Provinsi Kepri dalam melaksanakan tugasnya sudah dijalankan dengan baik seperti staf-staf Dinas Kelautan dan perikanan telah menjalankan program-program yang tercantum dalam Renstra kepada masyarakat Desa Teluk Bakau.

Tingkah Laku Atau Sikap Pelaksana Kebijakan

Berdasarkan hasil informasi dari salah satu informan bahwa tingkah laku pemerintah dalam menjalankan program-program di Desa Teluk Bakau sangat baik, dimana pemerintah dan masyarakat saling terbuka satusama lain dalam menjalankan program bersama. Sehingga program-program yang dijalankan pemerintah kepada masyarakat berjalan dengan lancar hingga saat ini, Selain itu keluhan masyarakat setempat ditanggapi sesuai dengan kemampuan dari pemerintah, seperti dalam hal program memberikan bantuan fasilitas menangkap ikan seperti, program yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan kepada masyarakat nelayan Desa Teluk Bakau berupa pemberian kapal fiber 3GT maupun 5 GT dan alat tangkap nelayan.

Struktur Birokrasi (bureaucratic structure)

Berdasarkan data Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 bahwa didalam Renstra tersebut telah terdapat struktur

organisasi Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri yang sudah tersusun secara sistematis yang dimana hal ini dapat digunakan sebagai bentuk menjalankan implementasi kebijakan yang ada di Provinsi Kepri.

Berdasarkan hasil di atas mengenai implementasi kebijakan perikanan tangkap dalam mendukung kesejahteraan nelayan di Desa Teluk Bakau, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perikanan tangkap yang diusulkan oleh George Edward III telah berjalan dengan baik dalam mendukung kesejahteraan nelayan Desa Teluk Bakau pada tahun 2023. Dengan melihat adanya program-program yang sudah dijalankan pemerintah kepada masyarakat serta respon dan praktik langsung yang dilakukan masyarakat seperti dalam sosialisasi pengelolaan hasil tangkapan dan mempraktikkan dengan mengolah hasil tangkapan dengan berbagai macam makanan.

Perikanan tangkap adalah kegiatan menangkap ikan dilaut bebas dengan menggunakan alat-alat pembantuan penangkapan. Perikanan tangkap adalah penangkapan dan pengumpulan hewan dan tanaman air yang hidup di laut atau perairan. Tujuan dari perikanan tangkap sendiri yaitu untuk memanfaatkan sumber daya ikan yang menguntungkan, selain itu perikanan tangkap menggunakan teknologi sederhana dan kompleks (L & Pramulya, 2022). Selain itu sektor perikanan tangkap memiliki peran yang penting, salah satu cara sektor perikanan tangkap membantu meningkatkan ekonomi masyarakat adalah dengan membangun usaha nelayan skala kecil (Nirmasari Dian, 2022). Perikanan dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu bidang yang dapat meningkatkan ekonomi negara, regional, dan lokal (Gumilar &

Nuryasin, 2022). Perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Bintan dalam melakukan usaha menangkap ikan, sebagian besar masyarakat masih menggunakan alat tangkap tradisional hanya beberapa yang menggunakan alat-alat modern. Kegiatan perikanan tangkap agar menjadi kegiatan yang menguntungkan bagi negara maupun daerah, haruslah mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat dengan memberikan kebijakan atau program-program yang mendukung masyarakat nelayan agar lebih baik dalam menghasilkan tangkapan, mengolah dan memasarkan hasil produksi perikanan tangkap demi keberlangsungan hidup masyarakat kedepan menjadi lebih baik. Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi kepulauan Riau telah membuat beberapa kebijakan terhadap masyarakat yang ada di Kepri seperti yang telah tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026.

Dalam proses pembuatan kebijakan yang telah tertuang di Rencana Strategis DKP Kepri diharapkan telah disesuaikan dengan proses pembuatan kebijakan yang dimana berakhir pada implementasi kebijakan. Sebab dalam pembuatan kebijakan proses implementasi kebijakan menjadi penentu terakhir dalam keseluruhan pembuatan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan, seperti yang dinyatakan oleh Hasbullah (2015) dalam Eliah Yuliah, adalah proses politik yang terdiri dari serangkaian tahap yang saling bergantung, tahap-tahap ini termasuk penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijaka (Yuliah, 2020). Dalam keseluruhan struktur kebijakan, tahapan implementasi kebijakan sangat penting karena proses kebijakan secara keseluruhan dapat memengaruhi seberapa berhasil atau tidak pencapaian tujuan (Mea, 2022). Implementasi kebijakan

adalah proses yang terus berubah di mana pelaksana kebijakan melakukan tindakan atau kegiatan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan (Yuliah, 2020).

Pada penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan perikanan tangkap dalam mendukung kesejahteraan nelayan di Desa Teluk Bakau. Peneliti menggunakan indikator teori George Edward III, yang dikutip dalam jurnal Yuliah, 2020. Edward menyatakan empat faktor atau variable penting untuk implementasi kebijakan publik, yaitu, Komunikasi (communication), Sumber Daya (resources), kecenderungan tingkah laku atau sikap (disposition atau attitude), serta struktur birokrasi (bureaucratic structure) (Yuliah, 2020).

Komunikasi (communication)

Komunikasi Edward mengatakan 3 komponen utama proses komunikasi kebijakan: transmisi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (concistency)

Tranmisi

Sebelum pejabat dapat mengambil tindakan, mereka harus mengetahui bahwa keputusan telah dibuat dan mereka telah diberi wewenang untuk melaksanakannya. Implementasi perintah menghadapi beberapa masalah. Pertama, ada perbedaan pendapat antara pelaksana dan pengambil kebijakan yang mengeluarkan perintah. Kedua, ada banyak tingkat birokrasi yang menghambat penyebaran informasi. Ketiga, para pelaksana seringkali salah memahami persyaratan kebijakan.

Kejelasan

Petunjuk pelaksanaan kebijakan harus diterima dan dikomunikasikan dengan jelas jika ingin dilaksanakan dengan baik. Dalam beberapa situasi, para pelaksana mungkin

tidak benar-benar memahami tujuan suatu kebijakan atau persyaratan operasionalnya; dalam situasi lain, mereka bahkan mungkin berusaha menggunakan keaburan untuk memanfaatkan kepentingan mereka sendiri. Karena tidak ada kejelasan, perubahan kebijakan yang tidak diantisipasi dapat terjadi.

Konsistensi

Perintah untuk menerapkan kebijakan harus konsisten dan jelas jika implementasinya ingin berhasil. Jika tidak, pelaksana kebijakan akan kesulitan melakukan tugas mereka. Sebaliknya, mereka akan dipaksa untuk mengambil sikap yang sangat leluasa terhadap interpretasi dan pelaksanaan kebijakan. Akibatnya, pelaksana lebih cenderung mengabaikan atau mendistorsi kebijakan jika itu bertentangan dengan kepentingan atau pilihan mereka. Sumberdaya adalah komponen dalam pelaksanaan kebijakan publik. Sumberdaya termasuk staf yang memadai dengan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, informasi, wewenang, dan fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul ke dalam bentuk dokumen untuk melaksanakan pelayanan publik.

Kecenderungan Tingkah Laku atau Sikap (disposition atau attitude)

Kecenderungan ini terjadi karena para implementor memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Kecakapan saja tidak cukup jika tidak ada niat dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Edward menyatakan bahwa banyak kebijakan memasuki "zona ketidakacuhan". Pelaksana kebijakan mendukung beberapa kebijakan, yang membuatnya efektif; namun, kepentingan individu atau organisasi

pelaksana kebijakan dapat bertentangan dengan kebijakan lain.

d) Struktur Birokrasi (bureaucratic structure)

Bahkan secara keseluruhan, birokrasi adalah salah satu lembaga yang paling sering melaksanakan kebijakan. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh struktur organisasi birokrasi. Panduan kegiatan yang konsisten, yang dapat digunakan oleh setiap implementator, merupakan komponen struktur yang sangat penting bagi setiap organisasi.

KESIMPULAN

Komunikasi, komunikasi antara pemerintah setempat atau Dinas kelautan dan Perikanan sudah berjalan sangat baik. Dimana pemerintah setempat telah membuat program sosialisasi kepada masyarakat, seperti yang saat ini masih berjalan mengenai sosialisasi pembinaan tentang pengolahan dan pemasaran ikan dan sosialisasi tempat pelelangan ikan yang saat ini masih dibicarakan oleh DKP dan masyarakat. Hal ini yang menjadi contoh adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan dan melaksanakan program kebijakan. Sumberdaya, komponen sumberdaya manusia yang dilakukan oleh staf DKP Provinsi Kepri dalam melaksanakan tugasnya sudah dijalankan dengan baik seperti staf-staf Dinas Kelautan dan perikanan telah menjalankan program-program yang tercantum dalam Renstra kepada masyarakat Desa Teluk Bakau. Tingkah Laku atau Sikap, tingkah laku pemerintah dalam menjalankan program-program di Desa Teluk Bakau sangat baik, dimana pemerintah dan masyarakat saling terbuka satusama lain dalam menjalankan program bersama. Selain itu keluh kesah

masyarakat setempat ditanggapi sesuai dengan kemampuan dari pemerintah. Struktur Birokrasi, struktur birokrasi yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan ini sudah dijelaskan dengan baik, dimana sudah digambarkan bagan struktur organisasi DKP sesuai dengan bidang-bidangnya sehingga dalam menjalankan pengembangan dan pembangunan kelautan dan Perikanan lebih optimal. Sehingga dapat dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perikanan tangkap di Desa Teluk Bakau telah berjalan dengan baik sesuai dengan indikator teori Edward III yaitu dalam mendukung kesejahteraan nelayan Desa Teluk Bakau pada tahun 2023. Dengan melihat adanya program-program yang sudah dijalankan pemerintah kepada masyarakat serta respon baik dari masyarakat.

REFERENSI

- Bintan, P. K. (2021). *Pemerintah Kabupaten Bintan | Portal Pemerintah Kabupaten Bintan*. <https://bintankab.go.id/visimisi>
- Fernanto, G., Amiruddin, S., & Maulana, D. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 194–214. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v4i1.13659>
- Gumilar, G. G., & Nuryasin, H. (2022). Efektivitas Program Pengembangan Perikanan Tangkap di Kabupaten Karawang. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(1), 273–282. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.612>
- Hastuti, I. D. (2022). *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan*. [http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19490/SKRIPSI_IRA_DWI_HASTUTI.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19490%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19490/SKRIPSI_IRA_DWI_HASTUTI.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Kepri, P. (2022). *Tentang Kepri* (p. 1). <https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri>
- L, I. A., & Pramulya, R. (2022). Analisis Saluran Pemasaran Perikanan Tangkap Di Kecamatan Samatiga. *Jambura Agribusiness Journal*, 3(2), 69–75. <https://doi.org/10.37046/jaj.v3i2.13414>
- Mamentu, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 2(2), 53–59.
- Mea, A. I. A. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN MELALUI PROGRAM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA BANK. *Journal Of Management and Bussines (JOMB)*, 4(1), 168–182. <https://doi.org/10.31539/jomb.v4i1.3497>
- Miza Nina Adlini et al. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Munandar, T. A. M. & D. (2020). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada Komunitas Nelayan Tradisional untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Lontar Kabupaten Serang. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah*, 5(2), 126–133. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/E-Plus/article/viewFile/9252/6030>
- Nirmasari Dian, B. M. (2022). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Tradisional Di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Strategies Increasing the

- Welfare of Traditional Fishers in Wara Timur District, Palopo City. *Jurnal Sains Dan Teknologi Perikanan*, 2(1), 29–37.
- Perikanan, D. kelautan dan. (2015). Rencana Strategis. In *Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026*.
<https://doi.org/351.077>
- Ramdan, D. F. (2023). Transformasi Manageria Transformasi Manageria. *Journal Of Islamic Education Management*, 3(2), 248–257.
<https://doi.org/10.47476/manageria.v3i2.3463>
- Suprajitno, H. (2021). Identifikasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Tradisional Di Kawasan Pesisir Pantai Popoh Kabupaten Tulungagung. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 1.
<https://doi.org/10.31602/as.v6i2.4372>
- Talib, A. (2018). Peluang dan Tantangan Industri Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dalam Mendukung Terwujudnya Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku Utara. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 11(1), 19.
<https://doi.org/10.29239/j.agrikan.11.1.19-27>
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153.